

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

#### a. Komponen Input

1. Puskesmas Selayo sudah memiliki tenaga PKPR namun belum mendapatkan pelatihan PKPR, seperti pelatihan konseling.
2. Sumber dana program PKPR di Puskesmas Selayo berasal dari dana BOK. Jumlah alokasi dana untuk PKPR di Puskesmas Selayo saat ini masih belum mencukupi, seperti pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan konselor kepada konselor sebaya.
3. Kebijakan program PKPR dari Pemerintah Pusat sudah ada, namun kebijakan di Kabupaten Solok belum ada untuk mendukung pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Selayo. Sehingga karena tidak adanya kebijakan ini, kerja sama lintas sektoral kurang terjalin, pelayanan kesehatan remaja yang dijamin pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan, masih mengeluarkan biaya.
4. Sarana dan prasarana di Puskesmas Selayo sudah ada, namun masih memiliki kendala, seperti penyediaan media KIE yang terbatas, letak ruangan PKPR yang berhadapan langsung dengan aula puskesmas menghambat pelayanan dan tidak satu pintu sehingga kurang menjaga privasi, serta kenyamanan pasien remaja.
5. Metode yang digunakan untuk pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Selayo sudah memiliki SOP serta alur pelayanan yang berpedoman kepada buku modul yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

## **b. Komponen Proses**

1. Perencanaan kegiatan PKPR dilakukan oleh pemegang program PKPR di Puskesmas Selayo pada awal tahun. Perencanaan program PKPR masih belum berjalan dengan baik karena masih belum melibatkan remaja dan belum adanya koordinasi dengan pihak sekolah, serta belum sesuai dengan kebutuhan remaja di wilayah kerja Puskesmas Selayo.
2. Pengorganisasian  
Puskesmas Selayo sudah memiliki tim PKPR dengan SK langsung dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas. Pengorganisasian tim PKPR belum berjalan, karena pembagian tugas yang belum jelas untuk setiap anggota.
3. Pelaksanaan kegiatan program PKPR di dalam gedung sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan di luar gedung seperti konselor sebaya dan PKHS belum dilaksanakan.
4. Pengawasan PKPR dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk program PKPR belum dilaksanakan. Puskesmas tidak melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan konselor sebaya di sekolah, namun hanya bentuk pembinaan saja. Hal ini belum sesuai dengan SN-PKPR yang ditetapkan. Data situasi derajat Kesehatan Kabupaten Solok belum menggambarkan secara akurat karena pencatatan dan pelaporan kasus belum lengkap.

## **c. Komponen Output**

Pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Selayo masih belum sesuai dengan Standar Nasional PKPR yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, karena masih ada kegiatan yang belum terlaksana seperti pelatihan konselor sebaya, PKHS,

dan belum berjalan dengan baik adalah KIE. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dengan tenaga, dana, sarana dan prasarana.

## 6.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk:
  - a. Melaksanakan pelatihan tentang teknik konseling minimal satu kali untuk petugas tenaga PKPR di Puskesmas.
  - b. Menyediakan dana yang dialokasikan khusus untuk kegiatan PKPR ini, seperti penyediaan dana untuk kegiatan pelatihan konselor dan PKHS.
  - c. Diharapkan kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Solok mengeluarkan kebijakan khusus terkait pembebasan biaya dari remaja sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKPR yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
  - d. Melaksanakan pengawasan dan sosialisasi minimal satu kali dalam setahun ke pihak Puskesmas.
2. Diharapkan kepada Puskesmas Selayo untuk:
  - a. Melakukan pembinaan tentang pemahaman pelaksanaan PKPR untuk tenaga pembina yang ada di sekolah.
  - b. Membuat sekat antara ruangan PKPR dengan Aula Puskesmas Selayo sehingga jika ada kegiatan di aula puskesmas, pelayanan tidak terganggu.
  - c. Diharapkan kedepannya perencanaan yang dilakukan di Puskesmas Selayo melibatkan remaja konselor sebagai perwakilan remaja dan pihak sekolah.
  - d. Adanya pembagian tugas yang jelas dan tertulis untuk pengorganisasian Tim PKPR di Puskesmas Selayo

- e. Melakukan pelatihan konselor sebaya ke sekolah sebanyak satu kali, dengan melatih siswa/siswi yang berasal dari kelas satu di sekolah.
  - f. Membuat SOP pelaksanaan PKPR di setiap sekolah seperti kegiatan PIK-Remaja.
  - g. Melakukan kegiatan sosialisasi PKPR secara rutin ke sekolah
  - h. Melakukan pengawasan minimal satu kali dalam enam bulan ke sekolah terkait dengan pelaksanaan PKPR.
  - i. Mencari sponsor, untuk pengadaan media penyuluhan.
3. Diharapkan kepada sekolah untuk:
- a. Mengaktifkan kembali PIK-Remaja di sekolah.
  - b. Kegiatan konseling Sebaya dapat menggunakan ruang BK, ataupun tempat lain disesuaikan dengan kondisi yang dapat menjaga privasi dan kenyamanan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

